PENERAPAN KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG ITE DALAM MENANGANI KEJAHATAN SIBER PENIPUAN ONLINE

Dwityas Witarti Rabawati¹, Rojalia Rica De Araujo², Antonia Alfiayu Zigha Nanga³, Ferdinandus Mario Recon Dupo Due⁴, Fransiskus Albertus Papu⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email: dwitrat@gmail.com, riiccarojalia@gmail.com, antoniananga71@gmail.com, dopomario688@gmail.com, fransiskusAlbertus25@gmail.com

Abstrak

Cybercrime adalah suatu istilah yang merujuk pada suatu kegiatan yang bersifat kriminal yang menggunakan komputer ataupun jaringan komputer sebagai sarana untuk bertindak dan sebagai suatu sasaran atau lokasi untuk bertindak kriminal. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008, yang kemudian perubahan pertama dengan UU No. 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua Undang Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan landasan hukum utama dalam penanganan kejahatan siber di Indonesia. Salah satu kasus kejahatan siber di Indonesia adalah penipuan online. Metode dalam penelitian ini menggunakan studa pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia merupakan langkah signifikan dalam memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur interaksi di dunia maya dan menangani kejahatan siber. Meskipun UU ITE telah mengalami beberapa revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, tantangan dalam penerapannya tetap ada, seperti potensi kriminalisasi pengguna Internet dan ketidakpastian dalam interpretasi beberapa pasal. UU ITE mengatur berbagai jenis kejahatan siber, termasuk penipuan online dan penyebaran informasi yang merugikan, dengan tujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif teknologi informasi

Kata Kunci : Cybercrime, UU ITE, Kebijakan Hukum

Abstract

Cybercrime is a term that refers to a criminal activity that uses a computer or computer network as a means of acting and as a target or location to commit criminal acts. The Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) No. 11 of 2008, which was then amended first by Law No. 19 of 2016 and the second amendment to Law (UU) Number 1 of 2024 which is the main legal basis in handling cybercrime in Indonesia. One of the cases of cybercrime in Indonesia is online fraud. The method in this research uses library research, which is a method with data collection by understanding and studying theories from various literature. The Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) in Indonesia is a significant step in providing a clear legal framework to regulate interactions in cyberspace and deal with cybercrime. Although the ITE Law has undergone several revisions to adapt to technological developments and the needs of society, challenges in its implementation are still present, such as the potential criminalization of Internet users and uncertainty in the interpretation of some articles. The ITE Law regulates various types of cybercrime, including online fraud and the dissemination of harmful information, with the aim of protecting the public from the negative impact of information technology

Keywords: Cybercrime, ITE Law, Legal Policy

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Cybercrime merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkembang pesat akibat perkembangan teknologi informasi. Cybercrime adalah suatu istilah yang merujuk pada suatu kegiatan yang bersifat kriminal yang menggunakan komputer ataupun jaringan komputer sebagai sarana untuk bertindak dan sebagai suatu sasaran atau lokasi untuk bertindak kriminal.¹ Ketika jumlah pengguna Internet meningkat, kejahatan yang dilakukan melalui media digital juga meningkat, sehingga menciptakan tantangan baru bagi penegakan hukum. Fenomena ini berlaku untuk semua jenis aktivitas ilegal yang dilakukan secara online, termasuk pencurian identitas, penipuan online, dan peretasan sistem. Kebijakan hukum pidana yang ada saat ini di banyak negara tidak mampu sepenuhnya mengatasi kompleksitas kejahatan online. Banyak negara masih mengandalkan undang-undang yang ada yang mungkin tidak efektif dalam mengubah kejahatan dunia maya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam menangani kasus-kasus ini.

Di Indonesia, terdapat beberapa kebijakan untuk menanggulangi kejahatan siber salah satunya adalah Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Politik Kriminal (criminal policy) merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan. Politik pidana diwujudkan dalam bentuk penal dan *non penal*. Oleh sebab itu, dalam politik kriminal terdapat politik hukum pidana. Politik hukum pidana sendiri memiliki arti “ suatu usaha yang berdasarkan logika untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana”.² Penanggulangan kejahatan dengan cara penal terdiri atas 3 tahap:

1. Formulasi (Kebijakan Legislatif)

Pada tahap ini anggota legislatif, menentukan nilai-nilai yang sesuai dengan saat ini dan masa depan. Kemudian anggota legislatif melakukan perumusan dalam bentuk undang-undang pidana untuk memenuhi nilai keadilan dan efisiensi.

¹ Nur Hadiyati and Hayllen Stathany, ‘Analisis Undang-Undang Ite Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia’, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.2 (2021), 146 <<https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1657>>.

² KHANZA JASMINE, ‘POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG’, *Jurnal Hukum Sasana*, 2014.

2. Aplikasi (Kebijakan Yudikatif atau peradilan)

Tahap dimana para penegak hukum harus menengakan nilai-nilai keadilan dan efisiensi.

3. Eksekusi (Kebijakan Eksekutif)

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan (pelaksanaan) hukum pidana secara khusus oleh aparat penegak hukum pidana. Pada tahap ini, lembaga penegak hukum pidana bertugas menegakkan hukum pidana dan peraturan yang dibuat oleh Kongres dengan menerapkan kejahatan yang ditentukan dalam keputusan pengadilan. Dalam menjalankan hukuman yang diperintahkan pengadilan, organisasi kriminal ini harus berpedoman pada hukum pidana dan aturan legislatif serta nilai-nilai keadilan dan penerapan dalam pelaksanaan tugasnya.³

Dalam KUHP Indonesia, cybercrime digolongkan sebagai kejahatan khusus, meskipun unsur-unsurnya dapat didasarkan pada ketentuan hukum pidana yang berbeda, namun dilakukan dengan cara (model) baru dari kejahatan tersebut. Sebagaimana dijelaskan Soerjono Soekanto salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sarana dan prasarana atau sarana yang mendukung penegakan hukum, karena faktor tersebut juga merupakan indikator efektifitas penegakan hukum dan berlakunya hukum.⁴

Kejahatan siber membutuhkan adanya hukum siber untuk mengatur dan menanggulangi berbagai tindakan ilegal di dunia maya. Di Indonesia, Kebijakan penanganan kejahatan siber memerlukan pendekatan hukum yang adaptif dan efektif untuk mengatasi ancaman yang terus berkembang. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008, yang kemudian perubahan pertama dengan UU No. 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua Undang Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan landasan hukum utama dalam penanganan kejahatan siber di Indonesia.⁵Selain itu, pemerintah Indonesia telah mendirikan lembaga dan unit khusus untuk menangani serta menyelidiki kasus kejahatan siber, seperti Badan Siber dan Sandi

³ Universitas Medan Area, 'KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN SARANA PENAL DAN NON PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOBA ANAK SEBAGAI PELAKU DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN', 2023.

⁴ Ana Irawati and others, 'Urgensi Cyber Law Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia Di Era Digital', *Prosiding Conference On Law and Social Studies*, 2021, 1–15 <<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>>.

⁵ *Dinamika Hukum and others*, 'Lex Researchia', 1 (2024), 1–4.

Negara (BSSN). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada masyarakat dan memastikan bahwa pelaku kejahatan siber dituntut dan dihukum sesuai dengan undang-undang yang ada.

Kejahatan dunia maya mempunyai dampak yang sangat besar, tidak hanya terhadap individu, namun juga terhadap dunia usaha, komunitas, dan negara. Data dalam jumlah besar bisa dicuri, infrastruktur penting bisa diserang, dan reputasi organisasi bisa hilang dalam sekejap. Salah satu kasus kejahatan siber di Indonesia adalah penipuan online, dimana MRP, melakukan penipuan terhadap Dedi, dengan mengiming-imingkan sebuah mobil. Karna Dedi terperdaya lalu ia mengirimkan uang sebesar Rp 50.000.000,00, atas hal tersebut dedinmelaporkan kejaian tersebut dan MRP dikenakan pasal 28 UU No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE (infomasi dan transaksi elektronik) dan ancaman hukumannya maksimal pidana penjara 6 tahun dan atu denda Rp 1 miliar.

Dari kasus tersebut kami ingin membahas lebih lanjut terkait penanggulangan kejahatan dalam bentuk penal dari politik kriminal yakni tahap aplikasi dalam penerapan kebijakan UU ITE.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diterapkan dalam praktik Penanggulanagan kejahatan siber terhadap kasus penipuan online oleh MRP?

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitrian ini menggunakan studa pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut.⁶ Metode ini melibatkan kajian mendalam terhadap buku, artikel ilmiah, dokumen kebijakan, dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan penerapan kebijakan, dampak yang ditimbulkan, serta

⁶ Miza Nina Adlini and others, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka', *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6.1 (2022), 974–80 <<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>>.

rekomendasi untuk perbaikan. Dengan menggunakan studi pustaka, peneliti dapat menggali teori-teori dan perspektif yang ada, serta memahami konteks hukum dan sosial yang mempengaruhi kebijakan tersebut.

PEMBAHASAN

a. Latar Belakang Kebijakan

UU ITE pertama kali diumumkan pada 21 April 2008. Di bawah kepemimpinan Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, gagasan UU ITE mulai muncul pada awal tahun 2000-an. Saat itu, terdapat kekosongan hukum dalam ranah dunia siber. Maka 2 perguruan tinggi negeri, Universitas Indonesia dan Universitas Padjaran, menyusun konsep RUU Cyberlaw versinya masing-masing. Dipimpin oleh Profesor Mieke Komar Kantaatmadja, Unpad merancang RUU Siber sebagai payung hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang TI. Oleh karena itu, RUU Cyberlaw versi Unpad bersifat umum yaitu mengatur e-commerce, perlindungan konsumen, perlindungan hak pribadi, persaingan usaha tidak sehat, hak kekayaan intelektual dan kejahatan dunia maya. Konsep hukum siber Unpad disebut dengan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI). Bersamaan dengan itu, RUU cyberlaw versi UI diinisiasi Lembaga Kajian Hukum Teknologi (LKHT) Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang diketuai Edmon Makarim. Konsep RUU Cyber versi UI cukup spesifik, hanya membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan transaksi elektronik seperti tanda tangan digital. UI menamainya RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (IETE).

Pada tahun 2003, kedua RUU tersebut digabung menjadi satu RUU untuk dibahas di DPR. Pada tahun 2005 atau saat Presiden Susilo Bambang Yudoyono memimpin, Kominfo (saat itu Departemen Kominfo) membentuk panitia kerja (panja) yang berjumlah 50 orang. RUU ITE dibahas dari tahun 2005-2007 saat kominfo dipimpin oleh Sofyan Djalil dan dilanjutkan pada masa Mohammad Nuh. Bagian pertama membahas e-commerce, yang berisi lokasi pasar digital dan non-digital, nama domain, serta tanda tangan elektronik. Sementara itu, bagian kedua fokus pada kejahatan teknologi informasi, yang terdiri dari berbagai subbagian. Bagian pertama mencakup konten ilegal, seperti informasi SARA, ujaran

kebencian, informasi palsu atau lelucon, penipuan online, pornografi, perjudian online, dan fitnah. Bagian kedua berkaitan dengan akses ilegal, seperti serangan hacker; bagian ketiga menyoroti intersepsi ilegal; dan bagian keempat membahas gangguan data, seperti gangguan atau intervensi sistem secara ilegal. Dalam konteks ini, Kominfo menggunakan pendekatan teori sintesa/hybrid dalam pembahasan RUU ITE, yang merupakan kombinasi antara teori instrumental dan teori substantif.

Setelah dibahas di DPR sejak tahun 2003, UU ITE akhirnya disahkan pada 25 Maret 2008. Undang-undang ini kemudian ditandatangani oleh Presiden SBY pada 21 April 2008 dan diundangkan pada hari yang sama. UU ini terdiri dari 13 bab dan 53 pasal. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008), dijelaskan bahwa tujuan undang-undang ini adalah untuk mendukung pembangunan nasional Indonesia, khususnya di bidang Teknologi Informasi dan transaksi elektronik. Namun, UU ITE menghadapi banyak keberatan segera setelah diberlakukan karena masih rentan terhadap pasal-pasal karet. Ancaman kriminalisasi yang menggunakan UU ITE telah lama disuarakan oleh berbagai pihak, terutama terkait dengan Pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian/SARA, yaitu:

1. Pasal 27 ayat (3)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”⁷

2. Pasal 28 ayat (2)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”⁸

Kala itu, sejumlah lembaga dan individu meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE karena dinilai mengancam kebebasan berekspresi

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Bi.Go.Id*, 2008, pp. 1–2.

⁸ *Ibid.*

yang dijamin oleh konstitusi. Pada tahun 2010, hasil rapat kerja antara Komisi I DPR dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengusulkan penggabungan Undang-Undang Penyiaran dengan UU ITE. Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, menyatakan bahwa revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akan difokuskan pada masalah terkait lamanya sanksi yang dikenakan.

Pada 2 September 2016, Ketua Panitia Kerja Revisi UU ITE, TB Hasanuddin, mengungkapkan bahwa Pemerintah dan DPR sepakat untuk mempertahankan pasal pencemaran nama baik dalam revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. DPR bersama Kominfo akhirnya merevisi UU ITE dan disahkan pada 27 Oktober 2016. Revisi tersebut ditandatangani oleh Jokowi pada 25 November 2016 dan diundangkan pada hari yang sama. Meskipun sudah direvisi, pasal-pasal karet dalam UU ITE yang dianggap dapat menjadi alat kriminalisasi masih tetap ada. Namun, Kominfo menyatakan bahwa pasal-pasal yang dianggap karet telah diberikan penegasan melalui lampiran penjelasan untuk menghindari multitafsir.

Tujuh tahun sejak perubahan pertama, pada tahun 2023 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disahkan. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dewan Perwakilan Rakyat RI tanggal 5 Desember 2023 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Pada tanggal 2 Januari 2024 Presiden Jokowi resmi sahkan Undang Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

1.2 Dasar Hukum

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia dibentuk berdasarkan beberapa dasar hukum yaitu:

- Dasar pembentukan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK :

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁹

⁹ Republik Indonesia.

- Dasar pembentukan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK :

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)¹⁰

- Dasar pembentukan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

Menimbang :

a. bahwa untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan, perlu diatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/ atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum;

¹⁰ Luc Vinet and Alexei Zhedanov, *Uu Ite Nomor 19 Tahun 2016, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 2011, XLIV, 287.

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 281, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);¹¹

1.3 Pelaksanaan Kebijakan

Produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah sebagai otoritas yang memiliki wewenang secara resmi dibagi menjadi dua jenis: Regelling dan beschikking, menurut teori politik hukum. Regelling (peraturan perundang-undangan) merupakan produk hukum yang tertulis yang bersifat mengikat terhadap sebagian atau seluruh masyarakat di wilayah negara. Tujuan peraturan ini untuk mengatur hal yang bersifat abstrak dan umum. Karena memiliki sifat mengikat, prosedur pembentukannya melalui proses yang ketat dan panjang sebelum diundangkan. Sedangkan, Beschikking adalah keputusan Tata Usaha Negara, artinya

¹¹ Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', 190185, 2024, 39.

ketetapan yang tertulis yang dibuat oleh pejabat pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya, serta bersifat individual dan Final.¹²

UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) merupakan produk hukum yang dapat dikategorikan sebagai regelling karena undang-undang ini dirancang untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Dengan demikian, UU ITE memberikan kerangka hukum yang jelas dan normatif bagi masyarakat dalam berinteraksi di dunia maya, termasuk pengaturan mengenai perlindungan data pribadi, larangan penyebaran informasi yang merugikan, serta penanganan kejahatan siber.

Dalam praktiknya kebijakan penanggulangan Kejahatan siber dasar hukum utamanya diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. dalam undang-undang ini hal yang diatur meliputi :

1. Pasal 27: Melarang distribusi, transmisi, dan akses informasi elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pemerasan, dan/atau pengancaman.
2. Pasal 28: Melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.
3. Pasal 29: Melarang pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
4. Pasal 30: Melarang akses ilegal terhadap sistem elektronik milik orang lain.
5. Pasal 31: Melarang intersepsi atau penyadapan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tertentu.
6. Pasal 32: Melarang perubahan, penambahan, pengurangan, transmisi, dan/atau penghilangan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain tanpa izin.
7. Pasal 33: Melarang tindakan yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya.

¹² Daian Cahayani, 'STUDI PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE DALAM PERSPEKTIF LEGAL DRAFTING', *Jurnal Ilmu Sosial*, 1 (2022).

8. Pasal 34: Melarang penggunaan sistem elektronik untuk tujuan penipuan atau manipulasi data.

9. Pasal 35: Melarang pembuatan, penyebaran, dan penggunaan perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang ini.

10. Pasal 36: Melarang penyalahgunaan identitas elektronik untuk tujuan yang melanggar hukum.

11. Pasal 37: Mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan dan integritas sistem mereka.

12. Pasal 38: Mengatur kewajiban pelaporan insiden keamanan siber kepada pihak berwenang.

Tahap aplikasi penanggulangan kejahatan siber dalam kasus ini dimulai saat korban melaporkan kejadian penipuan ke pihak kepolisian. Setelah menerima laporan, Tim Subdit Cyber Ditreskrimus Polda Sumut berkolaborasi dengan Sat Reskrim Polres Padangsidimpuan untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Tindakan cepat dan koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum ini menunjukkan efektivitas dalam tahap awal penanganan kejahatan siber. Pihak kepolisian kemudian melakukan investigasi dengan melacak rekening bank yang digunakan dalam transaksi penipuan, yang mengarah pada penangkapan tersangka MRP sebagai pemilik rekening.

Selanjutnya, dalam tahap aplikasi ini, pihak kepolisian menerapkan pasal 28 UU No.1/2024 tentang perubahan kedua atas UU No.11/2008 tentang ITE untuk menjerat tersangka. Penggunaan undang-undang terbaru ini menunjukkan adanya upaya untuk mengikuti perkembangan modus kejahatan siber. Ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp1 Miliar mencerminkan keseriusan dalam penindakan kejahatan siber. Selain itu, imbauan Kapolres Padangsidimpuan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan online menunjukkan bahwa tahap aplikasi tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan melalui edukasi publik. Beberapa hambatan potensial dan menilai efektivitas penerapan kebijakan :

- Hambatan dalam proses aplikasi:

1. Kompleksitas teknologi: Pelaku kejahatan siber sering menggunakan teknologi canggih yang dapat menyulitkan pelacakan dan pengumpulan bukti digital.
2. Yurisdiksi: Jika pelaku berada di luar wilayah hukum Indonesia, proses penangkapan dan penuntutan bisa menjadi lebih rumit.
3. Anonimitas pelaku: Pelaku utama (Feri) belum tertangkap, menunjukkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan melacak pelaku yang menggunakan identitas palsu online.
4. Keterbatasan sumber daya: Penanganan kejahatan siber membutuhkan peralatan khusus dan personel terlatih, yang mungkin tidak selalu tersedia di semua daerah.
5. Kecepatan perubahan modus operandi: Penjahat siber terus mengembangkan teknik baru, yang bisa lebih cepat dari perkembangan hukum dan prosedur penegakan.
6. Kesadaran masyarakat: Banyak korban mungkin tidak melaporkan kejahatan karena malu atau tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban

- Efektivitas penerapan kebijakan:

1. Respon cepat: Polisi berhasil menangkap tersangka MRP dalam waktu singkat setelah laporan, menunjukkan efektivitas dalam respons awal.
2. Koordinasi antar lembaga: Kerjasama antara Subdit Cyber Ditreskrimus Polda Sumut dan Sat Reskrim Polres Padangsidempuan menunjukkan koordinasi yang baik.
3. Penerapan UU terbaru: Penggunaan UU No.1/2024 menunjukkan upaya untuk mengikuti perkembangan kejahatan siber.
4. Sanksi yang tegas: Ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp1 Miliar bisa memberikan efek jera.
5. Upaya preventif: Imbauan Kapolres untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat menunjukkan pendekatan komprehensif dalam penanganan kejahatan siber.
6. Pelacakan transaksi keuangan: Keberhasilan melacak rekening bank menunjukkan efektivitas dalam menggunakan jejak finansial untuk menangkap pelaku.

1.4 Evaluasi Dampak dampak positif dan negatif dari kebijakan UU ITE terhadap masyarakat Indonesia:

- Dampak Positif:

1. Perlindungan hukum: UU ITE memberikan landasan hukum yang jelas untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan siber.
2. Peningkatan kepercayaan dalam transaksi elektronik: Aturan yang jelas mendorong pertumbuhan e-commerce dan fintech dengan meningkatkan kepercayaan konsumen.
3. Pencegahan kejahatan siber: Ancaman hukuman yang tegas dapat menimbulkan efek jera bagi calon pelaku kejahatan siber.
4. Kesadaran keamanan digital: Implementasi UU ITE mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya keamanan informasi digital mereka.
5. Dukungan untuk inovasi digital: Kerangka hukum yang jelas mendorong perkembangan teknologi dan inovasi digital di Indonesia.

- Dampak Negatif:

1. Potensi pembatasan kebebasan berekspresi: Beberapa pasal dalam UU ITE, terutama terkait pencemaran nama baik, dianggap dapat membatasi kebebasan berekspresi.
2. Ketidakpastian interpretasi: Beberapa istilah dalam UU ITE, seperti "menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian", bisa memiliki interpretasi yang subjektif.
3. Kriminalisasi pengguna internet: Ada kekhawatiran bahwa UU ITE bisa digunakan untuk mengkriminalisasi pengguna internet yang kritis terhadap pemerintah atau tokoh publik.
4. Beban psikologis: Ketakutan akan terjerat UU ITE dapat membuat masyarakat ragu untuk mengekspresikan pendapat mereka secara online.
5. Potensi penyalahgunaan: Ada risiko UU ITE disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengintimidasi atau membungkam kritik.
6. Tantangan bagi jurnalisme: Jurnalis dan media dapat menghadapi tantangan dalam melaporkan isu-isu sensitif karena takut terjerat UU ITE.
7. Kesenjangan digital: Pemahaman yang tidak merata tentang UU ITE di masyarakat dapat memperlebar kesenjangan digital.
8. Beban pada penegak hukum: Implementasi UU ITE memerlukan sumber daya dan keahlian khusus, yang bisa menjadi beban tambahan bagi aparat penegak hukum.

1. Rekomendasi

1. Revisi pasal-pasal kontroversial:

- Perjelas definisi dan batasan untuk pasal-pasal yang sering disalahartikan, seperti pasal tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.
- Tambahkan klausul yang lebih spesifik untuk melindungi kebebasan berekspresi dan kritik yang konstruktif.

2. Peningkatan literasi digital:

- Integrasikan pendidikan literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan nasional.
- Lakukan kampanye edukasi massal tentang penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab.

3. Penguatan kapasitas penegak hukum:

- Berikan pelatihan khusus dan berkelanjutan kepada aparat penegak hukum tentang kejahatan siber dan penerapan UU ITE.
- Bentuk unit khusus kejahatan siber di setiap daerah dengan sumber daya yang memadai.

4. Mekanisme penyelesaian sengketa alternatif:

- Kembangkan mekanisme mediasi atau arbitrase untuk kasus-kasus ringan terkait UU ITE sebelum masuk ke ranah pidana.

5. Perlindungan whistleblower dan jurnalis:

- Tambahkan klausul khusus untuk melindungi whistleblower dan jurnalis yang melaporkan isu-isu kepentingan publik.

6. Peningkatan kerjasama internasional:

- Perkuat kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional dalam menangani kejahatan siber lintas batas.

7. Evaluasi berkala dan transparansi:

- Lakukan evaluasi rutin terhadap implementasi UU ITE dan publikasikan hasilnya kepada publik.
- Libatkan masyarakat sipil dan ahli independen dalam proses evaluasi.

8. Penguatan infrastruktur keamanan siber:

- Investasi dalam pengembangan infrastruktur keamanan siber nasional.
- Dorong kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi dalam pengembangan teknologi keamanan siber.

9. Penyesuaian sanksi:

- Tinjau ulang skala sanksi agar lebih proporsional dengan tingkat pelanggaran.
- Pertimbangkan alternatif hukuman non-penjara untuk pelanggaran ringan.

10. Pembentukan lembaga pengawas independen:

- Bentuk lembaga independen untuk mengawasi implementasi UU ITE dan menangani keluhan masyarakat.

11. Harmonisasi dengan undang-undang terkait:

- Selaraskan UU ITE dengan undang-undang lain yang berkaitan, seperti UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Pers.

12. Peningkatan perlindungan konsumen digital:

- Perkuat aspek perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik dan penggunaan data pribadi.

KESIMPULAN

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia merupakan langkah signifikan dalam memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur interaksi di dunia maya dan menangani kejahatan siber. Meskipun UU ITE telah mengalami beberapa revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, tantangan dalam penerapannya tetap ada, seperti potensi kriminalisasi pengguna internet dan ketidakpastian dalam interpretasi beberapa pasal. UU ITE mengatur berbagai jenis kejahatan siber, termasuk penipuan online dan penyebaran informasi yang merugikan, dengan tujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif teknologi informasi. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan ini agar dapat lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan siber dan melindungi hak-hak masyarakat di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka', *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6.1 (2022), 974–80 <<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>>
- Area, Universitas Medan, 'KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN SARANA PENAL DAN NON PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOBA ANAK SEBAGAI PELAKU DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN', 2023
- Cahayani, Daian, 'STUDI PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE DALAM PERSPEKTIF LEGAL DRAFTING', *Jurnal Ilmu Sosial*, 1 (2022)
- Hadiyati, Nur, and Hayllen Stathany, 'Analisis Undang-Undang Ite Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.2 (2021), 146 <<https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1657>>
- Hukum, Dinamika, Dalam Penanganan, Kejahatan Siber, and Di Indonesia, 'Lex Researchia', 1 (2024), 1–4
- Indonesia, Republik, 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', 190185, 2024, 39
- Irawati, Ana, Hasan Bachtiar Fadholi, Alfarozi Nur Alamsyah, Dimas Pramodya Dwipayana, and Moh Muslih, 'Urgensi Cyber Law Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia Di Era Digital', *Prosiding Conference On Law and Social Studies*, 2021, 1–15 <<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>>
- JASMINE, KHANZA, 'POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG', *Jurnal Hukum Sasana*, 2014
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Bi.Go.Id*, 2008, pp. 1–2
- Vinet, Luc, and Alexei Zhedanov, *Uu Ite Nomor 19 Tahun 2016, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 2011, XLIV, 287